

**PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BERBASIS NILAI-NILAI  
PANCASILA DALAM MENCEGAH ISU RADIKALISME**

Esra Julita Br PA<sup>1</sup>, Roselli Lumbansiantar <sup>2</sup>, Saparutdin Brutu<sup>3</sup>, Riska Marpaung<sup>4</sup>,  
Abigael Siallagan<sup>5</sup>, Putri Andini <sup>6</sup>, Fazli Rachman <sup>7</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup>Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,  
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

esrajulitabrpernangin@gmail.com<sup>1</sup> sellylumbansiantar@gmail.com<sup>2</sup>,  
saparutdinbrutu@gmail.com<sup>3</sup>, riskamarpaung068@gmail.com<sup>4</sup>,  
abigaelsiallagan@gmail.com<sup>5</sup>, putriandini040703@gmail.com<sup>6</sup>,  
fazli.rachman@unimed.ac.id<sup>7</sup>

**ABSTRACT**

*Citizenship education is very important to build national character based on Pancasila values, especially in overcoming radicalism. Education based on Pancasila values is very important to foster national insight, an attitude of tolerance and a sense of togetherness in society because radicalism that develops in society can threaten national unity. The role of citizenship education in preventing radicalism is examined in this research. The research results show that internalizing Pancasila values in the learning process can help prevent radical ideology from spreading. By teaching values such as unity, humanity and social justice, students will better understand the importance of maintaining the integrity of the country. In this research, the literature study method was used to investigate various sources related to radicalism and citizenship education. Apart from that, this research also wants to explain how citizenship education based on Pancasila values helps students understand the importance of tolerance, pluralism and national awareness amidst the threat of radical ideology. Citizenship education is considered to be able to instill inclusive and moderate national values to prevent radicalism from spreading in society. The author also wants to know how effective citizenship education based on Pancasila values is in forming citizens who are aware of radicalism and have attitudes and behavior that support unity. and national unity.*

*Keywords: citizenship education, pancasila values, radikalisme*

### **ABSTRAK**

Pendidikan kewarganegaraan sangat penting untuk membangun karakter bangsa yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, terutama dalam mengatasi radikalisme. Pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sangat penting untuk menumbuhkan wawasan kebangsaan, sikap toleransi, dan rasa kebersamaan di masyarakat karena radikalisme yang berkembang di masyarakat dapat mengancam persatuan bangsa. Peran pendidikan kewarganegaraan dalam mencegah radikalisme dikaji dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran dapat membantu mencegah ideologi radikal menyebar. Dengan mengajarkan nilai-nilai seperti persatuan, kemanusiaan, dan keadilan sosial, siswa akan lebih memahami pentingnya menjaga keutuhan negara. Dalam penelitian ini, metode studi literatur digunakan untuk menyelidiki berbagai sumber yang berkaitan dengan radikalisme dan pendidikan kewarganegaraan. Selain itu, penelitian ini juga ingin menjelaskan bagaimana pendidikan kewarganegaraan yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila membantu siswa memahami pentingnya toleransi, pluralisme, dan kesadaran nasional di tengah ancaman ideologi radikal. Pendidikan kewarganegaraan dianggap dapat menanamkan nilai-nilai kebangsaan yang inklusif dan moderat untuk mencegah radikalisme menyebar di masyarakat. Penulis juga ingin mengetahui seberapa efektif pendidikan kewarganegaraan yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dalam membentuk warga negara yang sadar radikalisme dan memiliki sikap dan perilaku yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa.

Kata kunci: pendidikan kewarganegaraan, nilai pancasila, radikalisme

#### **A. Pendahuluan**

Indonesia adalah negara multikultural dengan berbagai suku, etnis, budaya, agama, kelompok

budaya, dan ras lainnya. Indonesia tidak dapat dipisahkan dari keragaman dan perbedaan ini, karena dari keragaman inilah

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki banyak budaya dan menganut semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pendidikan kewarganegaraan berfungsi untuk meningkatkan atau memperkuat karakter dan nilai moral warga negara. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan membantu warga negara memahami hak dan kewajiban mereka sendiri dan membantu mereka menerapkan sifat dan nilai moral yang baik di lingkungan sekitar dan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan harus dirancang sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam menjaga keharmonisan dan integritas masyarakat Indonesia.

Dunia saat ini menghadapi banyak masalah sosial, politik dan ekonomi dalam era globalisasi kontemporer. Radikalisme adalah salah satu masalah yang semakin mendesak dan memerlukan solusi segera. Radikalisme membahayakan keamanan negara dan stabilitas sosial dan budaya Indonesia. Radikalisme telah menjadi topik pembicaraan hangat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Kemunduran moralitas individu, ketidakadilan sosial-ekonomi, kurangnya kesadaran akan pentingnya pluralisme dan toleransi dan pengaruh media massa yang tidak terkendali adalah beberapa penyebab meningkatnya radikalisme. Akibatnya, untuk mengatasi dan mengurangi fenomena ini, diperlukan rencana pencegahan yang komprehensif. Pendidikan kewarganegaraan adalah salah satu metode yang paling efektif untuk mencegah radikalisme. (Bagus et al., 2023)

Pemerintahan Republik Indonesia didasarkan pada Pancasila sebagai dasarnya. Pancasila terdiri dari lima prinsip utama: Ketuhanan Yang Maha Esa, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesi dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Untuk menghasilkan generasi yang setia kepada ideologi bangsanya dan siap menghadapi tantangan masa depan, implementasi nilai-nilai ini sangat penting dalam proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan.

Contoh program pendidikan kewarganegaraan yang berhasil di beberapa tempat dan analisis empiris tentang seberapa efektif program tersebut dalam mengurangi kemungkinan radikalisme.

Dengan menggunakan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan utama model pendidikan yang tepat, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif dan proaktif. Seorang warga negara tidak hanya mempersiapkan diri untuk menjadi anggota masyarakat yang baik, tetapi mereka juga akan belajar tentang arti hidup bersama dalam keragaman sambil tetap menjadi diri mereka sendiri.

Tujuan utamanya adalah bahwa nilai-nilai Pancasila dapat dimasukkan ke dalam struktur bagian terpenting pendidikan kewarganegaraan secara signifikan yang dapat mengurangi kemungkinan munculnya ideologi atau gerakan ekstremis. Studi akademik menunjukkan bahwa ada hubungan langsung antara tingkat kesadaran etika dan perilaku sosial yang bermoral. (Ira et al., 2024)

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Rifky Alfian, 2021)

bahwa radikalisme telah menarik perhatian negara di seluruh dunia. Radikalisme adalah ide yang menginginkan perubahan besar dan cepat dalam sistem politik dan sosial suatu negara dengan menghalalkan kekerasan. Ketika orang berbicara tentang radikalisme, perhatian dunia akan tertuju pada negara Islam dan negara-negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun, meskipun ada banyak peristiwa yang serupa dengan radikalisme, label Islam sebagai agama radikal tetap tidak konsisten (Riky Alfian Hidayat, Wijianto, 2021).

Radikalisme di Indonesia adalah ancaman nyata bagi persatuan dan kerukunan bangsa. Oleh karena itu, untuk mencegah radikalisasi yang lebih luas, perlu ada tindakan yang terorganisir dan terkoordinasi. Salah satu cara strategis yang dapat dilakukan adalah dengan menjadikan PKn yang berbasis nilai Pancasila sebagai sarana untuk menanamkan (*internalisasi*) nilai toleransi antar satu sama lain.

Menurut Branson, bahwa pendidikan kewarganegaraan, bergantung pada peningkatan tiga kompetensi yang harus dimiliki setiap

warga negara: pengetahuan warga negara (*civil knowledge*), keterampilan warga negara (*civil skills*), dan karakter warga negara (*civil dispositions*). Ketiga kompetensi ini didorong oleh nilai-nilai yang sama, yaitu nilai-nilai moral. Jika ketiga kualitas ini ada dalam jiwa dan kepribadian seorang warga negara, mereka secara langsung atau tidak menunjukkan bahwa mereka saling toleran. (Muhamad et al., 2021)

Berbeda dengan penelitian jurnal sebelumnya yang memiliki fokus kajian terhadap pentingnya peran pendidikan *Interreligius* Berbasis Pancasila Sebagai Acuan Melawan Stigma Menguatnya Radikalisme secara rinci sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh (Zuyyina Candra Kirana, 2020) yang memiliki fokus kajian bahwa Pendidikan *Interreligius* yang menggunakan nilai Pancasila merupakan solusi tepat dalam mengurangi sifat fanatisme yang berlebihan. Penelitian ini secara khusus memiliki fokus kajian mengenai Pendidikan *interreligius* berbasis Pancasila yang berupaya menyediakan ruang aman dan inklusif bagi setiap individu untuk

mengekspresikan keyakinan mereka tanpa takut akan diskriminasi atau penolakan. Selain itu, pendidikan *interreligius* berbasis Pancasila menekankan pentingnya keterlibatan aktif generasi muda dalam masyarakat, melalui kegiatan sosial yang mempromosikan kerja sama lintas agama. (Kirana, 2020)

Selain itu, peneliti ingin menjelaskan bagaimana pendidikan kewarganegaraan yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila berfungsi untuk mengajarkan warga negara tentang pentingnya toleransi, pluralisme, dan kesadaran nasional di tengah ancaman ideologi radikal. Sebagai cara untuk mencegah penyebaran radikalisme di masyarakat, pendidikan kewarganegaraan dianggap mampu menanamkan nilai-nilai kebangsaan yang inklusif dan moderat. Dan penulis berusaha menentukan seberapa efektif pendidikan kewarganegaraan yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dalam membangun warga negara yang sadar radikalisme dan memiliki sikap dan perilaku yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa.

Artikel ini bertujuan untuk melihat bagaimana pendidikan kewarganegaraan yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sangat penting dalam memerangi radikalisme, khususnya di kalangan warga negara. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan saran tentang efektifnya pendidikan kewarganegaraan berbasis nilai Pancasila memaksimalkan perannya dalam menghentikan penyebaran paham radikal di Indonesia secara konseptual dan adaptif. Dari penelitian ini diharapkan mampu menciptakan warga negara yang hidup saling bertoleran antar sesama serta menyadarkan kita pentingnya mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

## **B. Metode Penelitian**

Sebelum dilakukannya penelitian maka peneliti terlebih dahulu menentukan metode penelitian di dalam menghimpun, mengolah, dan menganalisis data. Metode penelitian merupakan segala upaya di dalam kegiatan penelitian dimulai dari rumusan masalah hingga dengan kesimpulan. Adapun penulis disini menggunakan penelitian jenis

kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Penelitian kualitatif digunakan sebab memberi keleluasaan kepada peneliti untuk menggali data secara mendalam guna menjawab masalah yang diteliti (Creswell, 2015). Selain itu, data penelitian kualitatif data berupa kata-kata tertulis maupun lisan, gambar maupun data hasil pengamatan, serta tempat untuk menghasilkan data deskriptif yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, dan interpretasi makna pada data untuk menjawab pertanyaan pertanyaan penelitian (Creswell, 2015; Martono, 2016; Sidiq & Choir, 2019).

Alasan penulis memilih menggunakan metode penelitian studi literatur yaitu untuk mendapatkan informasi secara langsung dari buku, jurnal, website, penelitian penelitian terdahulu maupun bahan bahan tertulis lainnya yang kemudian data data yang telah diperoleh tersebut diolah dan dianalisis agar mendapatkan pemahaman dan dapat mencapai tujuan penelitian ini.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila memegang peranan penting dalam membentuk kesadaran kolektif masyarakat Indonesia untuk melawan radikalisme. Radikalisme di Indonesia saat ini menjadi ancaman serius bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Fenomena ini muncul sebagai respons terhadap ketidakpuasan sosial, politik, dan ekonomi, serta ketidakadilan yang dirasakan oleh sebagian kelompok masyarakat. Pendidikan Kewarganegaraan menjadi salah satu solusi strategis dalam upaya mencegah dan memerangi radikalisme, karena melalui pendidikan, generasi muda diajarkan untuk memahami nilai-nilai dasar bangsa yang tercermin dalam Pancasila dan menjunjung tinggi semangat toleransi, pluralisme, dan kebersamaan. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran fundamental dalam membentuk karakter warga negara yang berkualitas. Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama dalam Pendidikan Kewarganegaraan adalah pencegahan radikalisme melalui penanaman nilai-nilai Pancasila.

Pancasila, sebagai ideologi bangsa Indonesia, memiliki nilai-nilai fundamental yang sangat relevan dalam membangun bangsa yang beragam namun tetap bersatu. Radikalisme adalah ancaman serius yang dapat memecah belah bangsa dan mengganggu stabilitas negara. (Markum, 2020) Oleh karena itu, diperlukan strategi komprehensif melalui pendidikan untuk memerangi paham radikal yang dapat membahayakan kehidupan sosial-politik bangsa yakni sebagai berikut:

### **1. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Alat Deradikalisasi**

Pendidikan Kewarganegaraan bukan hanya sekedar mata pelajaran di sekolah, tetapi merupakan instrumen penting dalam membentuk karakter bangsa. Pendidikan ini dirancang untuk memperkuat pemahaman peserta didik tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik serta untuk membentuk sikap toleransi, menghargai perbedaan, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut Branson (2000), Pendidikan

Kewarganegaraan bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu:

a) *Pengetahuan Warga Negara (Civic Knowledge):*

Pengetahuan mengenai sistem politik, hukum, dan pemerintahan yang demokratis. Pendidikan Kewarganegaraan memberikan wawasan mendalam mengenai fungsi negara, hak-hak warga negara, serta cara berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. Pengetahuan ini penting dalam melawan narasi radikalisme yang sering kali berusaha memanipulasi konsep negara dan agama.

b) *Keterampilan Warga Negara (Civic Skills):*

Kemampuan untuk menganalisis dan menilai isu-isu sosial-politik secara kritis. Pendidikan Kewarganegaraan membantu peserta didik untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis terhadap informasi yang mereka terima, terutama yang berkaitan dengan ideologi

radikal. Keterampilan ini sangat penting dalam menghadapi propaganda radikal yang sering disebarakan melalui media sosial.

c) *Karakter Warga Negara (Civic Dispositions):*

Sikap dan perilaku yang mendukung keberlangsungan demokrasi, seperti toleransi, menghormati hak orang lain, dan cinta tanah air. Nilai-nilai ini penting dalam memerangi radikalisme, karena radikalisme kerap muncul dari sikap intoleransi dan fanatisme sempit yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan pluralisme. Penanaman tiga pilar tersebut dalam Pendidikan Kewarganegaraan berbasis Pancasila dapat menjadi benteng kuat dalam menghadapi penyebaran paham radikal. Nilai-nilai demokrasi yang ditanamkan akan membuat peserta didik lebih terbuka dalam menyikapi perbedaan, sekaligus membangun kesadaran untuk menjaga keutuhan bangsa.

## **2. Nilai-Nilai Pancasila sebagai Dasar Memerangi Radikalisme**

Pancasila adalah ideologi yang mengandung nilai-nilai luhur dan universal yang dapat diaplikasikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam upaya deradikalisasi. Setiap sila dalam Pancasila mengandung nilai-nilai yang relevan untuk melawan radikalisme. Berikut ini adalah penjelasan lebih detail mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat berperan dalam Pendidikan Kewarganegaraan untuk memerangi radikalisme:

### **1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa**

Sila pertama menekankan pentingnya hubungan yang harmonis antara agama dan negara. Dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan, nilai ini mengajarkan kepada peserta didik untuk menjunjung tinggi toleransi antarumat beragama dan menghormati kebebasan beragama. Pendidikan Kewarganegaraan berbasis Pancasila bertujuan untuk mengikis sikap fanatisme sempit yang kerap menjadi akar dari radikalisme. Dengan memahami

bahwa Indonesia adalah negara yang menjamin kebebasan beragama, peserta didik akan lebih menghargai keberagaman agama dan menolak segala bentuk kekerasan yang dibenarkan atas nama agama.

### **2. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab**

Sila kedua mengajarkan tentang pentingnya menghargai martabat setiap manusia tanpa membedakan suku, agama, ras, atau golongan. Pendidikan Kewarganegaraan menginternalisasikan nilai kemanusiaan ini kepada peserta didik agar mereka menghormati hak asasi manusia (HAM) dan keadilan sosial. Radikalisme sering kali tumbuh dari ketidakadilan sosial yang dirasakan oleh sebagian kelompok masyarakat. Oleh karena itu, melalui Pendidikan Kewarganegaraan yang menekankan pentingnya keadilan dan kemanusiaan, radikalisme dapat dicegah dengan cara mengatasi ketidakadilan tersebut.

### **3. Sila Persatuan Indonesia**

Persatuan Indonesia adalah inti dari kebhinekaan yang dimiliki bangsa ini. Pendidikan

Kewarganegaraan mengajarkan bahwa meskipun Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, dan budaya, kita semua adalah satu kesatuan bangsa. Sila ini sangat penting dalam memerangi radikalisme yang sering kali berusaha memecah belah bangsa melalui isu-isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Melalui pendidikan ini, peserta didik diajarkan untuk menjaga persatuan dengan semangat gotong-royong, saling menghargai perbedaan, dan menolak segala bentuk perpecahan yang diusung oleh ideologi radikal.

#### **4.Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan**

Sila keempat menekankan pentingnya demokrasi dan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Pendidikan Kewarganegaraan mendidik peserta didik untuk berperan aktif dalam sistem demokrasi, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah dan mufakat. Nilai-nilai ini penting dalam mencegah radikalisme, karena radikalisme sering kali muncul dari ketidakpuasan

terhadap sistem demokrasi yang ada. Dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya partisipasi politik yang sehat dan demokratis, Pendidikan Kewarganegaraan dapat mengurangi potensi munculnya paham-paham radikal.

#### **5. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia**

Sila kelima mengajarkan tentang pentingnya keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketidakadilan sosial sering kali menjadi lahan subur bagi radikalisme, di mana kelompok-kelompok radikal mengeksploitasi ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem ekonomi dan sosial. Pendidikan Kewarganegaraan yang menekankan pentingnya keadilan sosial dapat mencegah radikalisme dengan memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang pentingnya pemerataan dan keadilan bagi semua golongan. Selain itu, pendidikan ini juga mengajarkan bahwa segala bentuk perubahan sosial harus dilakukan melalui cara-cara yang damai dan konstitusional. (Angga & Terorisme, 2023)

### **3. Strategi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Memerangi Radikalisme**

Radikalisme merupakan fenomena global yang kini juga menjadi masalah serius di Indonesia. Banyak penelitian menunjukkan bahwa salah satu cara efektif untuk mencegah radikalisme adalah dengan memperkuat pendidikan kewarganegaraan yang berfokus pada pengajaran nilai-nilai toleransi, pluralisme, dan perdamaian. Pendidikan kewarganegaraan yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila memainkan peran strategis dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya menjaga persatuan dan keharmonisan di tengah keragaman.

Pendidikan kewarganegaraan harus mampu menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam diri setiap warga negara, sehingga mereka dapat menjadi individu yang memiliki pemahaman yang kuat tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Pendidikan ini juga berfungsi untuk menanamkan sikap kritis terhadap paham-paham radikal yang bertentangan dengan nilai-nilai

kebangsaan. Seperti yang dikemukakan oleh Branson (2021), pendidikan kewarganegaraan harus dapat meningkatkan tiga kompetensi utama, yaitu pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan karakter kewarganegaraan (*civic dispositions*). Jika ketiga kompetensi ini dapat dimiliki oleh setiap warga negara, maka radikalisme dapat diminimalisir.

Deradikalisasi melalui Pendidikan Kewarganegaraan berbasis Pancasila dapat dilakukan melalui pendekatan yang terstruktur dan komprehensif. Beberapa strategi yang dapat diimplementasikan meliputi, Pendidikan nilai-nilai Pancasila harus dimulai sejak dini, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Nilai-nilai seperti toleransi, gotong-royong, dan kebhinekaan harus diajarkan kepada anak-anak sejak kecil agar mereka tumbuh menjadi individu yang menghargai perbedaan dan menolak segala bentuk kekerasan atau fanatisme sempit. Pendidikan ini dapat dilakukan melalui pelajaran formal maupun kegiatan ekstrakurikuler yang mendorong

partisipasi aktif peserta didik dalam kehidupan sosial. Pelibatan Aktif Guru dan Orang Tua, Guru dan orang tua memiliki peran penting dalam membentuk karakter peserta didik.

Oleh karena itu, mereka harus dilibatkan secara aktif dalam upaya deradikalisasi melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Guru harus mampu mengajarkan nilai-nilai Pancasila dengan cara yang kreatif dan menarik, sementara orang tua harus memberikan teladan dalam kehidupan sehari-hari.

Sinergi antara sekolah dan keluarga ini sangat penting dalam mencegah penyebaran paham radikal di kalangan generasi muda. Penggunaan Teknologi sebagai Sarana Pendidikan Kewarganegaraan, Teknologi informasi dan komunikasi dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila dan meningkatkan pemahaman peserta didik tentang bahaya radikalisme. Pemerintah dan institusi pendidikan dapat mengembangkan platform digital yang menyediakan materi-materi Pendidikan Kewarganegaraan berbasis Pancasila. Dengan

demikian, peserta didik dapat belajar secara mandiri tentang pentingnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam memerangi radikalisme(Widodo, 2019)

#### **D. Kesimpulan**

Penelitian ini membuktikan bahwa pendidikan kewarganegaraan (PKn) yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila memainkan peran yang signifikan dalam menghentikan penyebaran radikalisme di Indonesia.

Pendidikan kewarganegaraan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip Pancasila seperti persatuan, kemanusiaan, dan keadilan sosial membantu membentuk generasi muda yang sadar akan pentingnya mempertahankan integritas bangsa. Pendidikan bukan hanya subjek; itu adalah alat penting untuk membangun warga negara yang menghargai perbedaan, toleran, dan pluralis.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa memfokuskan pada tiga kompetensi utama pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, dan karakter kewarganegaraan adalah

cara yang efektif untuk melakukan deradikalisasi dalam pendidikan. Pendidikan kewarganegaraan dapat menjadi benteng yang kuat dalam menghadapi ancaman radikalisme dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila pada setiap orang.

Disarankan untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila sejak dini di rumah, sekolah, dan masyarakat; partisipasi aktif orang tua dan guru; dan penggunaan teknologi untuk mengajar kewarganegaraan. Sinergi antara dukungan keluarga dan pendidikan formal sangat penting untuk mencegah penyebaran ideologi radikal.

Oleh karena itu, PKn yang didasarkan pada Pancasila dapat membantu membangun masyarakat yang toleran, inklusif, dan sadar akan pentingnya mempertahankan persatuan bangsa di tengah keragaman dalam jangka panjang.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Agatha, R., Frangky, A., Hukum, F., Tarumanagara, U., Barat, K. J., & Jakarta, P. D. K. I. (2024). *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 / PUU / XXI*

*/ 2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.* 2(2), 1002–1008.

Angga, P. R., & Terorisme, R. D. A. N. (2023). *IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA MENANGKAL.* 6, 3144–3151.

Aziz, A. (2023). *Analisis Inkonstitusionalitas Perubahan Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.* 90.

Bagus, S., Mona, M., & Mentari, A. (2023). *Educare: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran Peran Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Ilmu Kewarganegaraan.* 3(2), 43–51.

Fahmi, R. (2021). *JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan.* July, 33–42. <https://doi.org/10.24269/jpk.v6.n2.2021.pp33-42>

Hakim, H. L. (2019). *CIVICS EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE JOURNAL(CESSJ) Volume 1 Nomor 2 Bulan Desember 2019.* 1, 129–143.

Hanif Hardianto, Sri Wahyu Krida

- Sakti, M. (2024). *MASALAH BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN: STUDI OPEN LEGAL POLICY DALAM PUTUSAN MK NO. 90 90/PUU-XXI/2023*. 14, 15–27.
- Ira, A., Ruwaidah, S., Salsabil, A. M., Safitri, A., Hanapiah, F. N., Khotimah, H. H., Aulia, N. F., Noviyanti, N. S., Azzahra, S. F., & Furnamasari, Y. F. (2024). *KEBANGSAAN Oleh karena itu , pemahaman yang komprehensif mengenai peran pendidikan Pancasila dalam membentuk karakter yang solid dan kesadaran kebangsaan yang mantap menjadi esensial dalam upaya untuk membentuk masa depan yang lebih baik bagi negara dan berkelanjutan . berwawasan kebangsaan . 5(3), 2696–2704.*
- Kirana, Z. C. (2020). *Pendidikan Interreligius Berbasis Pancasila Sebagai Acuan Melawan Stigma Menguatnya Radikalisme Sekolah Tinggi Islam Blambangan ( STIB ) Banyuwangi Sekolah Tinggi Islam Blambangan ( STIB ) Banyuwangi*. 150–169.
- Markum, W. (2020). *UPAYA MEMBANGUN KARAKTER BANGSA MENCEGAH RADIKALISME DAN TERORISME DI INDONESIA*. 8(1).
- Mei, V. N., Ramdani, F., Ulwan, M. N., Arief, L. A., Al-farisi, M. F., Rochiman, R., H, R. M. N. N., Kogoya, A., & Furnamasari, Y. F. (2024). *Pentingnya Pendidikan Pancasila Dalam Membangun Kesadaran Identitas Nasional Dan Semangat Cinta Tanah Air Pada Mahasiswa Program Studi Teknik Komputer , Universitas Pendidikan Indonesia kualitas , salah satu faktornya adalah karena perubahan nilai-nilai serta bertambahnya*. 2(3), 282–296.
- Muhamad, Y. M., Muchtar, S. Al, & Anggraeni, L. (2021). *Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Upaya Internalisasi Nilai Toleransi Dalam Mencegah Potensi Radikalisme di Universitas Pendidikan Indonesia*. 7(3), 1270–1279. <https://doi.org/10.31949/educati>

- o.v7i3.1403
- Rachman, F., Nurgiansah, T. H., & Kabatiah, M. (2021). *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN Profilisasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum Pendidikan Indonesia*. 3(5), 2970–2984.
- Riky Alfian Hidayat, Wijianto, W. (2021). *PEMBERDAYAAN ORGANISASI KESISWAAN GUNA MENCEGAH RADIKALISME DI KALANGAN SISWA*. 9(1).
- Sugitanata, A., Islam, U., Sunan, N., & Yogyakarta, K. (n.d.). *DINAMIKA KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DYNAMICS OF CONSTITUTIONAL COURT DECISIONS REGARDING THE AGE LIMITS OF PRESIDENTIAL AND VICE PRESIDENTIAL CANDIDATES*. 127–146.
- Uoda Syahputra, A. A. (2024). Tinjauan Hukum Pengaturan Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU XXI/2023. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6, 2919–2930. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i5.2232>
- Wenzana, K. H., Nafilah, H., & Novitasari, M. (2024). *Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Toleransi di Lingkungan Mahasiswa*. 2(3).
- Widodo, P. (2019). *Moderasi Agama dan Pemahaman Radikalisme di Indonesia*. 15(5), 9–14.
- Yensi Matdha Datu Lullung. (2023). *TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TENTANG PERUBAHAN BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN*. *Hukum*.
- Zahra, A., & Dewi, D. A. (2022). *Peran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Menanamkan Nilai Pancasila pada Anak Usia Dini*. 6, 10884–10889.